

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian nasional sampai dengan awal tahun 2016 diperkirakan masih belum menguat yang disebabkan dampak krisis ekonomi global yang dipicu oleh terjadinya peningkatan suku bunga di Amerika Serikat dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina serta depresiasi nilai tukar Yuan. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan perdagangan dunia melambat dan penurunan harga minyak mentah yang secara tidak langsung berpengaruh pula pada situasi perekonomian nasional dan regional.

Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Kabupaten Wonosobo khususnya pada kegiatan investasi, ketenagakerjaan dan pengembangan UMKM. Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan peluang bagi Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka perekonomian Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 diproyeksikan masih tetap optimis dengan didukung oleh terealisasinya pembangunan infrastruktur ekonomi, berkembangnya UMKM yang berbasis produk unggulan daerah, berkembangnya sektor pariwisata, meningkatnya kemandirian pangan, terkendalinya inflasi dan dukungan regulasi yang efektif.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2017 diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan dan energi serta peningkatan daya saing produk lokal dalam rangka pengurangan kemiskinan menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah. Guna mendukung tercapainya sasaran kebijakan tersebut perlu didukung dengan fokus prioritas pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM.

1. Kondisi Ekonomi Daerah

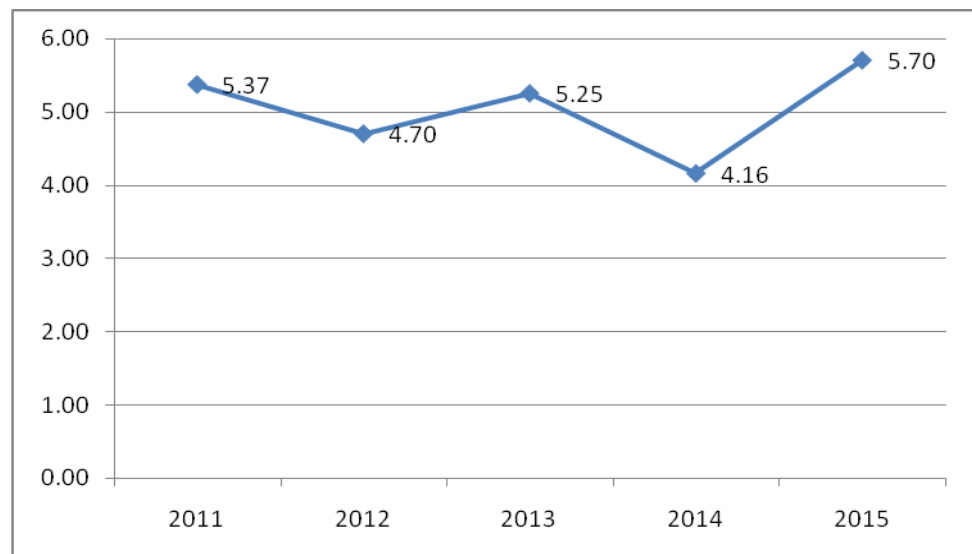
Kondisi ekonomi makro daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi banyak ditentukan oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju inflasi.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo menunjukkan nilai yang berfluktuasi atau naik turun. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37% kemudian di tahun 2012 turun menjadi 4,70% dan meningkat di tahun 2013 sebesar 5,25% di tahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi 4,16% dan tahun 2015 meningkat menjadi 5,70%.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar berikut.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2015



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2012-2015

Penurunan laju pertumbuhan Kabupaten Wonosobo sebagian besar berada di lapangan usaha sektor primer yaitu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang pada tahun 2013 tumbuh sebesar 2,83% dan menurun drastis pada tahun 2014 menjadi -0,48% akan tetapi di tahun 2015 meningkat cukup signifikan sebesar 5,14%. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2015 adalah jasa perusahaan sebesar 9,72% disusul informasi dan

komunikasi sebesar 9,42%, transportasi dan pergudangan sebesar 8,64%, jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,64% serta penyediaan akomodasi dan makan minum 8,05% di mana sebagian besar lapangan usaha tersebut berada di sektor tersier.

Laju pertumbuhan Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun dasar 2010
Tahun 2011-2015 di Kabupaten Wonosobo

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,17	3,18	2,83	-0,48	5,14
2	Pertambangan dan Penggalian	3,28	2,99	3,78	9,09	2,54
3	Industri Pengolahan	5,84	5,65	5,65	4,25	5,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,83	7,50	7,50	3,98	-3,52
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,45	3,98	3,98	7,55	1,63
6	Konstruksi	2,11	5,96	5,96	5,30	7,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,28	5,45	5,45	5,13	4,21
8	Transportasi dan Pergudangan	5,05	9,18	9,18	10,03	8,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,41	5,46	5,46	7,39	8,05
10	Informasi dan Komunikasi	11,27	9,12	9,12	12,11	9,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,89	7,38	7,38	10,72	8,35
12	Real Estate	4,41	10,58	10,58	10,08	7,59
13	Jasa Perusahaan	7,35	11,85	11,85	8,99	9,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,35	3,10	3,10	1,31	5,56
15	Jasa Pendidikan	15,67	9,50	9,50	10,92	7,14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	10,05	8,57	8,57	11,66	7,08
17	Jasa Lainnya	2,36	10,83	10,83	8,87	4,28
Laju pertumbuhan (%)		5,37	4,70	5,25	4,16	5,70

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2012-2015

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 10.045,11 milyar meningkat di tahun 2015 menjadi Rp. 14.584,35 milyar. Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 dari Rp. 9.489,55 milyar di tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 11.513,48 milyar di tahun 2015. Dari tujuh belas lapangan usaha sebagian besar mengalami kenaikan kecuali untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam tahun 2011-2014 setiap tahunnya mengalami penurunan nilai baik atas dasar harga harga berlaku maupun atas dasar harga konstan sedangkan di tahun 2015 ada peningkatan yang signifikan..

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015

No	Lapangan Usaha	ADHB (Milyar Rupiah)					ADHK (Milyar Rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,507.33	3,740.26	4,164.68	4,481.78	4,896.97	3,301.68	3,406.76	3,503.18	3,486.21	3,665.44
2	Pertambangan dan Penggalian	99.02	102.25	109.52	130.73	147.54	93.34	96.13	99.75	108.82	111.59
3	Industri Pengolahan	1,673.14	1,832.25	1,974.57	2,226.55	2,426.45	1,537.63	1,621.38	1,712.94	1,785.78	1,878.56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.58	3.85	3.98	4.15	4.17	3.55	3.90	4.19	4.36	4.21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.87	13.04	13.75	15.15	16.02	12.77	12.86	13.38	14.39	14.62
6	Konstruksi	589.38	654.25	712.64	814.14	916.28	561.77	601.53	637.35	671.15	720.28
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,790.43	1,873.95	2,032.31	2,194.02	2,348.43	1,716.25	1,766.54	1,862.82	1,958.34	2,040.78
8	Transportasi dan Pergudangan	473.29	508.51	559.88	658.70	740.02	472.70	506.98	553.53	609.05	661.64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296.93	333.37	376.50	428.91	475.44	282.78	302.17	318.66	342.23	369.78
10	Informasi dan Komunikasi	109.51	118.63	126.73	136.46	148.22	108.05	119.77	130.69	146.52	160.32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	276.16	314.37	353.15	411.25	465.73	260.53	272.56	292.69	324.08	351.13
12	Real Estate	150.02	159.40	177.81	205.97	228.05	147.40	155.18	171.61	188.90	203.24
13	Jasa Perusahaan	19.99	21.84	25.38	28.37	32.58	18.73	19.84	22.19	24.18	26.53
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	266.83	297.26	321.06	347.22	379.46	262.18	264.07	272.27	275.83	291.16
15	Jasa Pendidikan	467.84	589.28	700.22	810.31	878.42	414.69	478.71	524.20	581.43	622.95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104.31	125.58	143.81	167.07	186.86	97.21	108.51	117.81	131.54	140.86
17	Jasa lainnya	204.48	205.36	235.35	272.49	293.70	198.29	199.01	220.56	240.13	250.41
PDRB		10,045.11	10,893.45	12,031.34	13,333.27	14,584.34	9,489.55	9,935.90	10,457.82	10,892.94	11,513.50

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2012-2015

Distribusi sektor ekonomi Kabupaten Wonosobo masih didominasi tiga lapangan usaha utama yang memiliki kontribusi dominan. Di mana pada tahun 2015 peranan lapangan usaha pertanian masih menduduki peringkat tertinggi sebesar 33,58 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,64 persen dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan lapangan usaha terbesar dalam PDRB masih berada di sektor primer dan sektor sekunder. Jika dibandingkan tahun 2014, pada tahun 2015 beberapa lapangan usaha mengalami peningkatan peranan yaitu Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate;

Jasa perusahaan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan peranan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa pendidikan dan Jasa lainnya. Sementara Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial di tahun 2013 dan 2014 kontribusinya stabil.

Perkembangan kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010-2015 (%)

No	Lapangan Usaha	Kontribusi (%)				
		2011	2012	2013	2014	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,9	34,3	34,6	33,6	33,58
2	Pertambangan dan Penggalian	0,99	0,94	0,91	0,98	1,01
3	Industri Pengolahan	16,66	16,82	16,41	16,70	16,64
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	5,87	6,01	5,92	6,11	6,28
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,82	17,20	16,89	16,46	16,10
8	Transportasi dan Pergudangan	4,71	4,67	4,65	4,94	5,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,96	3,06	3,13	3,22	3,26
10	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,09	1,05	1,02	1,02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,75	2,89	2,94	3,08	3,19
12	Real Estate	1,49	1,46	1,48	1,54	1,56
13	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,66	2,73	2,67	2,60	2,60
15	Jasa Pendidikan	4,66	5,41	5,82	6,08	6,02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	1,04	1,15	1,20	1,25	1,28
17	Jasa Lainnya	2,04	1,89	1,96	2,04	2,01
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2012-2015

PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2015 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dimana pada tahun 2011 PDRB per kapita ADHB sebesar Rp. 13.203,96 ribu meningkat menjadi Rp. 18.767,27 ribu di tahun 2015. Demikian pula PDRB ADHK tahun 2011 sebesar Rp. 12.473,69 ribu meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 14.815,66 ribu.

PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
PDRB per Kapita Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 – 2015 (Ribu Rp)

Tahun	ADHB	ADHK
2011	13.203,96	12.473,69
2012	14.236,28	12.984,90
2013	15.638,97	13.593,62
2014	17.242,49	14.086,67
2015	18.767,27	14.815,66

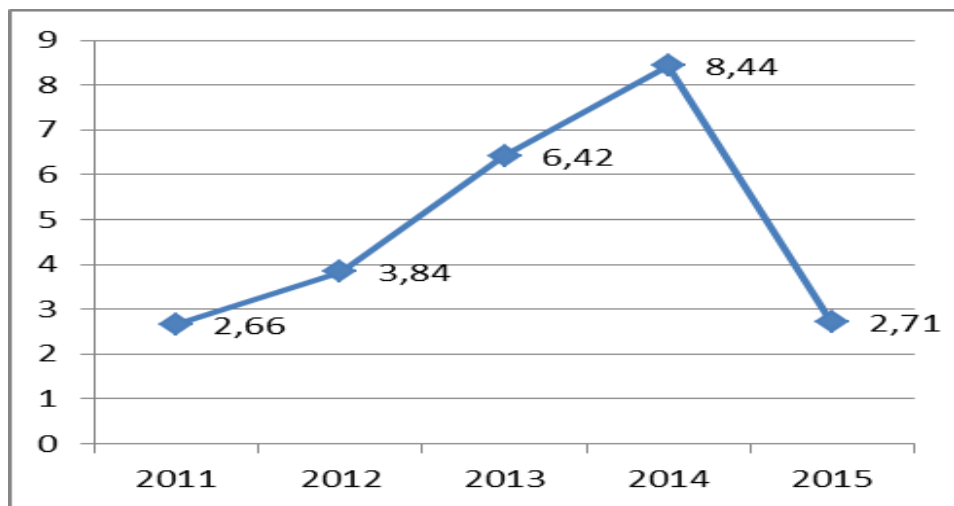
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2012- 2015

c. Inflasi

Perkembangan inflasi Kabupaten Wonosobo dalam tahun 2011-2015 menunjukkan trend yang meningkat sampai tahun 2014, dengan angka inflasi pada tahun 2013 dan 2014 meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 6,42% di tahun 2013 dan 8,44% di tahun 2014, sementara pada tahun 2015 menurun secara signifikan menjadi 2,71.

Perkembangan inflasi Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.

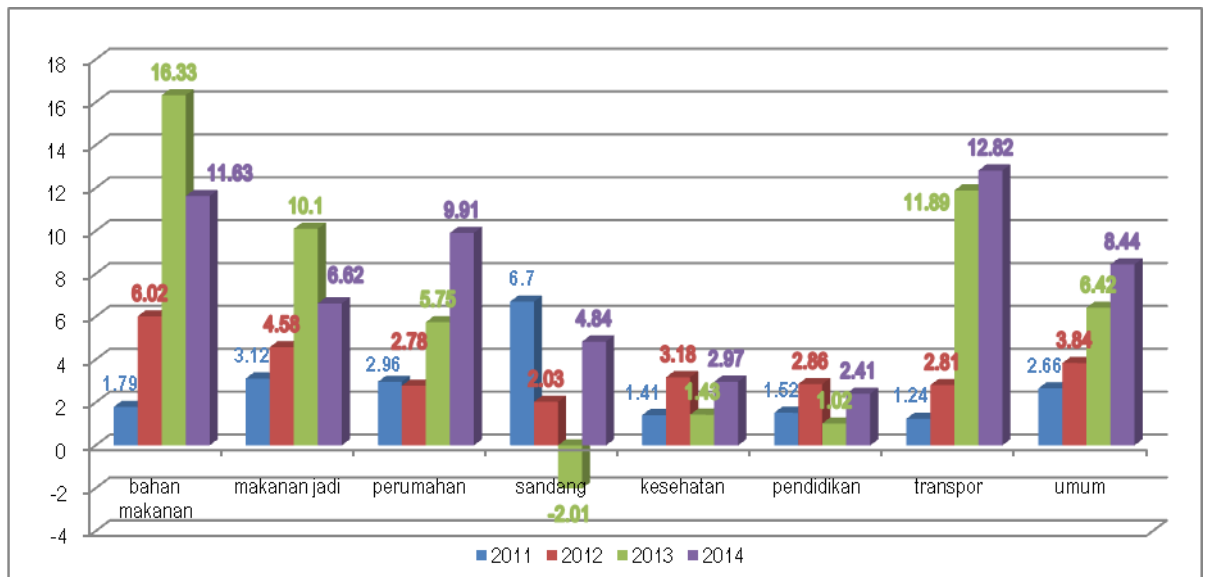
Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2012- 2016

Beberapa komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi selama tahun 2013 adalah bahan makanan sebesar 16,33% diikuti transpor sebesar 11,89% dan makanan jadi sebesar 10,10%. Sedangkan inflasi pada tahun 2014 sumbangan terbesar dari transport sebesar 12,82% diikuti bahan makanan sebesar 11,63% dan

perumahan sebesar 9,91%. Secara lengkap sumbangan komoditas pada angka inflasi Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada gambar berikut. Sumbangan Komoditas untuk Angka Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2014



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2012-2015

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2017 masih akan dipengaruhi perlambatan ekonomi global, turunnya harga komoditi ekspor, kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar yang akan berdampak pada melemahnya mata uang.

Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Wonosobo antara lain :

1. Masih banyaknya penduduk yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan.
2. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada kegiatan ekonomi khususnya UMKM.
3. Fluktuasi harga BBM yang menyebabkan ketidakpastian dunia usaha.
4. Penurunan harga komoditas ekspor yang berpengaruh terhadap nilai ekspor non migas Kabupaten Wonosobo.
5. Fluktuasi harga terutama pangan dan pasokannya.
6. Ekspektasi dunia usaha untuk meningkatkan daya serap angkatan kerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menekan angka pengangguran.
7. Resiko bencana alam pada beberapa wilayah di Kabupaten Wonosobo.

Peluang yang dapat dimanfaatkan Kabupaten Wonosobo antara lain :

1. Letak geografis dan potensi ekonomi Kabupaten Wonosobo yang cukup besar di sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan dan pariwisata.
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan investasi melalui penyelenggaraan PTSP.
3. Kualitas infrastruktur ekonomi yang semakin meningkat.
4. Potensi alam Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar berpotensi pariwisata.
5. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi lokal.
6. Kondusifitas wilayah yang stabil dan budaya masyarakat yang ramah.

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Wonosobo saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2017 dan 2018 dapat diprediksikan sebagai mana tabel berikut.

Tabel 3.5
Perkembangan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2015,
Target Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017-2018

No	Indikator	2014	2015	2016*)	2017*)	2018*)
1.	PDRB :					
	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	13.333,27	14.300,00	15.350,00	16.500,00	17.700,00
	Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp)	10.892,94	11.300,00	11.650,00	12.500,00	12.900,00
2.	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	4,16	4,2-5,3	4,3-5,4	4,4-5,5	4,5-5,6
3.	Inflasi (%)	8,44	2,71	4+1	4+1	4+1
4.	PDRB per Kapita ADHK (Ribu Rp)	14,096,67	14.500,00	14.950,00	15.400,00	15.900,00
5.	Nilai realisasi investasi (Milyar Rp)	220,45	235,00	250,00	265,00	280,00
6.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,34	5,24	5,15	5,06	4,97
7.	Angka kemiskinan (%)	21,42	20,5-19,5	19,6-17,5	17,6-15,5	15,6-13,5
8.	NTP	107,85	104	104,50	104,70	104,90

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2013-2015; Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2016
*Keterangan : *) RPJMD Rancangan Teknokratis Kabupaten Wonosobo, 2016-2020*

Sejalan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2017 yaitu "Pemantapan kualitas reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas daerah guna mempercepat penurunan angka kemiskinan" maka prioritas pembangunan ekonomi tahun 2017 adalah :

1. Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
2. Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan di atas antara lain melalui :

1. Pengembangan infrastruktur ekonomi di pusat pertumbuhan kawasan perdesaan (pengembangan pasar desa).
2. Pengembangan kawasan perdesaan melalui agropolitan, minapolitan dan agroindustri.
3. Peningkatan ketahanan pangan melalui percepatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas.
4. Pembangunan dan pengembangan pariwisata terpadu.
5. Pengembangan pasar kecamatan sebagai penyangga perekonomian kabupaten berbasis kawasan pertumbuhan.
6. Pembangunan ekonomi lokal melalui percepatan pengembangan koperasi, UMKM/IKM berbasis sentra, klaster, inkubator bisnis dan OVOP.
7. Peningkatan investasi dan ekspor komoditas unggulan.
8. Pengendalian inflasi daerah.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sedangkan tiga komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 25, kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Untuk menentukan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo ke depan, perlu dihitung perkiraan kemampuan anggaran berdasarkan anggaran tahun sebelumnya dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan terjadi. Selanjutnya dirumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Adapun realisasi dan prediksi belanja daerah tahun 2013-2017 dapat dilihat pada table berikut.

No	Uraian	2013	2014	2015	Penetapan 2016	Prediksi 2017
A	PENDAPATAN	1,144,182.51	1,277,145.67	1,432,282.85	1,702,813.13	1,845,140.24
1	PAD	108,729.51	175,319.36	182,730.83	164,649.56	173,510.13
	Pendapatan Pajak Daerah	26,416.35	26,122.82	27,484.14	30,905.00	32,059.90
	Pendapatan Retribusi Daerah	19,024.71	23,816.88	9,967.18	10,057.73	11,010.21
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6,129.82	8,179.05	9,290.54	11,377.00	12,514.70
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	57,158.63	117,200.61	135,988.97	112,309.83	117,925.32
2	DANA PERIMBANGAN	758,139.01	824,656.34	836,382.53	1,236,403.30	1,340,293.82
	Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	34,640.80	40,988.32	31,393.03	37,054.50	38,907.23
	Dana Alokasi Umum	665,548.03	724,245.01	748,447.76	841,407.18	925,547.89
	Dana Alokasi Khusus	57,950.18	59,423.01	56,541.74	357,941.62	375,838.70
3	LAIN-LAINPENDAPATAN YG SAH	277,313.99	277,169.97	413,169.49	301,760.27	331,336.29
	Pendapatan hibah	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	Bagi hasil pajak	42,906.74	47,049.30	81,707.80	79,497.41	87,447.15
	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	145,810.63	169,467.71	198,827.67	0.00	0.00
	Bantuan keuangan	88,596.62	55,652.96	132,634.02	66,209.39	72,830.33
	ADD	0.00	0.00	0.00	150,053.47	165,058.81
B	BELANJA	988,103.77	1,220,323.64	1,494,415.00	1,801,693.75	1,917,425.53
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	657,244.35	789,389.09	880,919.99	1,103,617.91	1,166,597.03
	Belanja Pegawai	587,856.93	628,029.13	694,946.39	851,364.84	889,108.80

No	Uraian	2013	2014	2015	Penetapan 2016	Prediksi 2017
	Belanja Hibah	15,153.12	104,130.61	30,628.17	1,370.00	1,507.00
	Belanja Bantuan Sosial	3,023.60	3,340.36	2,991.64	85.50	171.00
	Belanja Bagi Hasil kepada Kab & Pemerintah Desa	-	0.00	3,060.32	4,096.27	4,505.90
	Belanja bantuan keuangan	49,362.13	51,418.02	147,026.67	238,701.30	262,504.33
	Belanja tidak terduga	1,848.57	2,470.97	2,266.80	8,000.00	8,800.00
2	BELANJA LANGSUNG	330,859.42	430,934.55	613,495.01	698,075.84	750,828.50
	Belanja Pegawai	10,250.81	13,751.85	21,913.67	22,500.41	26,439.59
	Belanja Barang dan Jasa	182,413.51	211,084.69	334,201.78	318,726.48	337,476.96
	Belanja Modal	138,195.10	206,098.01	257,379.56	356,848.95	386,911.95
SURPLUS/DEFISIT		156,078.74	56,822.03	(62,132.15)	(98,880.62)	(72,285.29)
C	PEMBIAYAAN	141,079.07	270,944.79	300,282.13	98,880.63	72,285.28
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	156,079.07	297,208.76	342,050.87	114,911.22	112,697.75
	Penggunaan SilPA	156,022.98	297,157.83	327,766.82	114,911.22	112,697.75
	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	14,232.28	0.00	0.00
	Penerimaan Piutang Daerah	56.09	50.93	51.77	0.00	0.00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15,000.00	26,263.97	41,768.74	16,030.59	40,412.47
	Pembentukan Dana Cadangan	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10,000.00	19,263.97	41,768.74	16,030.59	40,412.47
APBD		1,300,261.58	1,574,354.43	1,774,333.72	1,817,724.35	1,957,837.99

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo, 2013-2016;
Bagian Keuangan dan Asset Daerah Setda Wonosobo, 2013-2016;
Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2016

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah pada dasarnya tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah, maka kebijakan yang ditempuh antara lain :

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sampai saat ini Sumber Pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan Pembangunan Daerah yang terus meningkat, kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin serta mengoptimalkan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2017 meliputi :

1. Penataan peraturan daerah di bidang pendapatan asli daerah.
2. Optimalisasi pungutan PAD.
3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu.
5. Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak.
8. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system*.
9. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah.
10. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
11. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah.
12. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah.
13. Menggali sumber-sumber penerimaan pajak baik dari sektor unggulan maupun sektor informal.
14. Monitoring sumber-sumber pendapatan untuk mengurangi kebocoran.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Arah kebijakan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian optimalisasi prioritas sasaran pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas, anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara terus-menerus dilaksanakan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dengan melakukan realisasi anggaran tepat waktu.
2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Transparansi dan akuntabel, setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan sehingga masyarakat mudah dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 maka kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung diarahkan untuk :

- a. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
- b. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional.
- c. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan wilayah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Mengakomodir program pembangunan yang dijangkit melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi di bidang perencanaan.
- e. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat.
- f. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.
- g. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui pengelolaan keuangan daerah yang optimal (keseimbangan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, penetapan APBD tepat waktu, penyerapan APBD tepat waktu, penganggaran berbasis kinerja dll).
- h. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, meliputi:
 1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai perspektif hak warga (*rights-based approach*).
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
6. Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM.
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim.
8. Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo dari tahun 2014-2015 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk menutup selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara rinci kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk :

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan apabila terjadi defisit sedapat mungkin bisa ditutup dengan SiLPA tahun lalu.
2. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2017, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
3. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan, diarahkan untuk :

1. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
2. Pembentukan dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat strategis misalnya belanja pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dana cadangan bencana alam.